

---

## FRAMING GERAKAN FORUM MASYARAKAT MINANGKABAU DAN ADVOKASI KEBIJAKAN INVESTASI DI KOTA PADANG: KASUS PT. LIPPO TBK.

Wira Hospita<sup>1</sup>, Aidinil Zetra<sup>2</sup> & Afrizal<sup>3</sup> <sup>1,2,3</sup>Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: <sup>1</sup>[wirahospita@gmail.com](mailto:wirahospita@gmail.com), <sup>2</sup>[aidinil@yahoo.co.id](mailto:aidinil@yahoo.co.id), & <sup>3</sup>[afrizal\\_2002au@yahoo.com](mailto:afrizal_2002au@yahoo.com)

### Abstract

*Social movements are a typical form of community activism, where there is a form of collective action with a clear conflictual orientation and bound by a sense of solidarity and a strong collective identity. This article highlights the success strategies of the Minangkabau community movement that are members of the Minangkabau Community Forum (FMM) rejecting Siloam's investment, and advocating for the policies of the Padang City Government (Pemko) regarding the principle permit for utilization of room number 650.44 / Bapeda / II-2013. FMM assesses that the City Government's policy has threatened the values of the customs and religion, mobilizing collective action based on cultural issues, where Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah is used as the main frame to mobilize the community to support advocacy.*

**Keywords:** *Strategy, Civil Society, Policy Changes.*

### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak terjadi gerakan sosial (*social movement*) dalam upaya menentang atau mendorong terjadinya perubahan sosial terhadap kebijakan publik, baik di tingkat daerah, nasional, maupun global. Perlawanan yang muncul merupakan bentuk tindakan masyarakat dalam mengapresiasi rasa ketidakpuasan terhadap sistem regulasi dan kebijakan publik.

Di Indonesia, gagasan dan praksis *civil society* semakin berkembang dan kuat sejak tumbanganya rezim Orde Baru, sebagai respon terhadap pengelolaan politik oleh rezim otoriter dan hegemonik, yang sering melakukan intervensi terhadap kelompok-kelompok kepentingan. Demokratisasi yang dilakukan dari atas (*top-down*) yakni negara sebagaimana diharapkan banyak kalangan, masih jauh dari harapan.

Tuntutan akan terciptanya ruang publik yang lebih luas dan pergerakan *civil society* yang mandiri, membuat entitas sosial ini menerobos batas-batas

kelas serta memiliki kapasitas politik yang mampu menjadi kekuatan pengimbang (*balance of force*) dari kecenderungan-kecenderungan intervensi negara. Pada saat yang sama, masyarakat mampu melahirkan pula kekuatan kritis reflektif (*reflektif force*) dalam mencegah derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses formasi sosial moderen (Hikam, 1996:86).

Penelitian ini fokus pada institusional gerakan *civil society* dalam melakukan fungsi advokasi terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu mengungkap strategi dari keberhasilan FMM mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait dengan persetujuan izin prinsip pemanfaatan ruang. Menariknya penelitian ini karena berkaitan dengan gerakan penolakan masyarakat terhadap keberadaan investasi Lippo Group, yang dianggap akan melakukan upaya Kristenisasi.

Pemerintah Kota Padang telah mengizinkan investasi senilai Rp. 1,3 triliun kepada investor kanal Lippo Group untuk mendirikan Rumah Sakit (RS) Siloam dan Super Block Lippo Group (Lippo Plaza) di jalan Khatib Sulaiman. Izin diberikan oleh walikota berupa kemudahan berinvestasi dan pembebasan pengurusan IMB (Harian Umum Haluan Padang, Sabtu, 11 Mei 2013). Adanya izin dari walikota, menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terbitnya IMB Lippo Plaza Nomor. 0351/IMB/LL/LT 11/ PU (Padang Utara) 04/2013 tanggal 3 Mei 2013 oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB), melanggengkan Lippo Group untuk menanamkan investasinya di Kota Padang, yakni dengan membangun Lippo Plaza yang di dalamnya terdapat hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan terdiri dari TK hingga SMA yang mampu menampung 1.680 siswa.

Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pemberian izin investasi privat untuk Lippo Group, dinilai tidak pro-rakyat, sehingga menuai aksi kontra dari masyarakat. Forum Masyarakat Minang (FMM) yang dibentuk oleh tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, kalangan kaum adat,

kalangan tokoh agamawan dan mahasiswa di Sumatera Barat, secara intensif mengkritisi kebijakan investasi rencana pendirian RS Siloam.

Salah satu bentuk penolakan dari Ormas Sumbar yang tergabung ke dalam FMM, dengan lantang disuarakan salah satu tokohnya M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM Sumbar) mengatakan, FMM menyatakan sikap menolak pembangunan RS Siloam di Kota Padang. Alasan penolak adalah kekhawatiran terkait dugaan adanya misi Kristenisasi dalam proyek tersebut, mengingat *track record* pimpinan Lippo Group, James T. Riyadi yang selama ini punya agenda mengembangkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia, termasuk wilayah Sumbar yang menjadi salah satu targetnya.

Berangkat dari fakta dan data yang telah dikumpulkan, FMM berargumentasi bahwa pembangunan *super block* akan merusak nilai adat dan agama masyarakat Minangkabau yang mayoritas Islam, yang menunjung tinggi nilai Adat Basadi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan akan menjadi permasalahan apabila dibiarkan kaum Nasrani memasuki dan menguasai daerah Sumbar dikhawatirkan akan menodai adat dan agama orang Minang.

Kekhawatiran FMM ini tampaknya cukup beralasan, karena sebelumnya di Sumbar juga pernah terjadi investasi dengan misi misionaris di Kota Bukittinggi pada tahun 1980-an dengan proyek pendirian RS Immanuel. RS ini berlokasi di dekat lapangan kantin Bukittinggi. Namun saat itu, para tokoh Sumbar seperti Buya Hamka dan Muzni M Yunus menentang proyek tersebut dan menemui Presiden Soeharto untuk mengalihkan proyek tersebut ke daerah lain.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka strategi advokasi yang digunakan oleh FMM (Forum Masyarakat Minangkabau) untuk menganalisis pengaruh Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait kebijakan investasi Lippo Group, sehingga Pemko melakukan perubahan substansi dari kebijakan tentang persetujuan izin prinsip pemanfaatan ruangan nomor

650.44/Bapeda/II-2013. Selain itu juga untuk mengetahui unsur-unsur dari kekuatan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil Minangkabau yang tergabung pada sebuah forum masyarakat minangkabau (FMM) tolak Siloam untuk mengadvokasi kebijakan pemerintahan yang dirasa oleh masyarakat sebagai sebuah kebijakan yang tidak memihak kepada publiknya.

## **B. LANDASAN TEORI**

Fokus penelitian ini adalah gerakan sosial sebagai kekuatan efektif dalam mendorong terciptanya perubahan politik dan kebijakan publik. Teori sistem politik, yang dikemukakan oleh Almond tidaklah terlepas dari apa yang telah dibicarakan oleh David Easton sebelumnya (teori organisme), dengan tetap mengasumsikan bahwa negara, masyarakat dan individu adalah sebuah sistem. Teori sistem menurut Almond dimaknai bahwa dalam setiap sistem terdapat struktur, dan setiap struktur memiliki fungsi (Mas'ood & MacAndrws, 1997).

Selain struktur, Almond menunjukkan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi politik yang dibagi dalam dua bagian: fungsi Input, yaitu artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, komunikasi politik dan rekrutmen politik. Fungsi Output, yaitu pembuatan, penerapan dan penghakiman kebijaksanaan. Almond berasumsi bahwa pada setiap sistem politik pasti terdapat fungsi-fungsi yang harus ada demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri. Tanpa fungsi-fungsi itu tidak akan ada sistem politik. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada usaha menemukan fungsi-fungsi politik yang ada dalam suatu sistem politik dan kemudian menelaah struktur apa yang melaksanakan fungsi-fungsi itu

Struktur politik didefinisikan sebagai suatu pola interaksi yang dianggap sah, yang tujuannya mempertahankan dan memelihara tata masyarakat pada masyarakat politik "modern". Struktur politik yang dijelaskan oleh Almond terdiri dari enam komponen, yaitu: kelompok kepentingan, partai politik,

legislatif, eksekutif, birokrasi, dan yudikatif. Sri Soemantri (2009), maka struktur politik yang diungkapkan oleh Almond dapat dipilah dalam 2 kategori dan diperkaya dengan sejumlah unsur struktur politik yang lain, sebagaimana berikut ini:

Selanjutnya untuk menganalisis tumbuh kembangnya gerakan sosial merujuk pada tiga faktor penting yaitu kesempatan politik (*political opportunities*), struktur mobilisasi (*mobilization structures*), dan proses pbingkaian (*framing processes*).

Struktur kesempatan politik merupakan salah satu teori yang dipergunakan oleh para akademisi gerakan sosial dalam menjawab pertanyaan mengapa sebuah aksi kolektif masyarakat dalam bentuk protes, gerakan sosial dan revolusi terjadi dalam riset gerakan sosial. Melalui struktur kesempatan politik, McAdam dalam Situmorang (2013), menjelaskan bahwa teori kesempatan politik dapat digunakan sebagai variabel utama berkaitan dengan dua prinsip variabel dependent, yaitu momentum aksi kolektif, dan hasil dari sebuah aktifitas gerakan.

Teori mobilisasi sumber daya berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial. Menurut Oberschall dalam Locher (2002) dalam Sukmana (2013), istilah mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Teori *framing* gerakan sosial mencoba untuk memahami bagaimana cara aktor gerakan sosial memuat dan menggunakan makna atau bagaimana kejadian-kejadian dan ide-ide di bingkai.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Arikunto (2007), menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan atau status suatu fenomena. Afrizal (2013), membagi metode penelitian kualitatif menjadi dua variasi: metode penelitian kualitatif yang etnografis dan metode penelitian yang nonetnografis.

Penelitian kualitatif, memposisikan peneliti adalah instrumen utama dalam proses penelitian. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dengan informan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan data dari individu secara umum untuk tujuan informasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka. Untuk membuat interpretasi yang tidak bertentangan, peneliti kemudian melakukan pemeriksaan silang informasi melalui studi literatur yang terkait dengan topik penelitian.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan yang didapatkan dalam penelitian gerakan advokasi oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi dari Pemko Padang untuk Lippo Group, terdapat sebuah pola interaksi saling mempengaruhi antara unit-unit dalam sistem politik tersebut, yakni antara unit suprastruktur (pemerintahan) dengan unit infrastruktur (kelompok kepentingan), dimana telah terjadi tuntutan dari unit infrastruktur terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh unit suprastruktur, dan uniknya adalah tuntutan tersebut direspon cepat dan masuk ke dalam sebuah proses sistem politik yang melahirkan kepuasan akan sebuah output yang diinginkan.

Inti utama dari pergerakan ini tersebut berisi tuntutan, antara lain:

- a. Menolak Pembangunan Super Block Lippo/Siloam di Jalan Khatib Sulaiman oleh Lippo Group Pimpinan James T. Riady.
- b. Meminta Pemerintah dan DPRD Kota Padang untuk membatalkan izin pembangunan Super Block Lippo/Siloam.

Sebagai tindak lanjut dari aksi kolektif tersebut, dilakukanlah kembali konsolidasi yang bertujuan untuk penggalangan massa yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2013, ketujuh tokoh pionir di atas mulai melakukan langkah-langkah untuk membentuk koalisi dengan beberapa organisasi Islam, khususnya organisasi Islam garis keras dan organisasi kelembagaan adat, di antaranya MUI Sumbar, LKAAM dan ormas-ormas Islam Sumatera Barat. Tujuannya yakni untuk mendapatkan dukungan penuh terkait isu yang diusung dalam pergerakan tersebut.

Konsolidasi lintas lembaga terbentuk dengan suara bulat untuk menjadi basis gerakan, dimana MUI Sumbar mendapatkan amanah untuk membentuk tim koordinasi untuk pergerakan menolak pembangunan *super block* Siloam. Tahap selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2013 melalui MUI Sumbar melayangkan surat keputusan bersama atas hasil konsolidasi bersama yang dilakukan pada tanggal 3 Juni 2013, yang ditujukan kepada Pemerintah Sumbar, dengan substansi meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti tuntutan mereka tersebut.

Menganalisa gerakan sosial advokasi FMM dengan perspektif kesempatan politik gerakan sosial masyarakat muncul karena akses terhadap lembaga politik mengalami keterbukaan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor dukungan lingkungan dan faktor dukungan aktor terlibat.

Faktor lingkungan dapat dilihat dari struktur masyarakat yang mendukung untuk melakukan perlawanan yakni Masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi kearifan lokal nilai-nilai keislaman, yaitu Adat Basandi

Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Oleh karena kesamaan nilai dalam identitas kolektif inilah aksi resistensi ini terjadi.

Selanjutnya dukungan dari aktor gerakan menjadi alat untuk melakukan perubahan, peran dari tokoh agama dan tokoh adat menjadi legitimasi FMM untuk melakukan pergerakan advokasi terhadap kebijakan pemerintah. Tidak sebatas dukungan dari aktor agama dan adat semata, dalam pergerakan ini ditemukan adanya kepentingan lainnya yang ikut menempel yakni kepentingan dari aktor politik dan aktor ekonomi dengan kepentingan bisnis. Akibatnya, gerakan advokasi ini menjadi alat dari kalangan elit untuk berpartisipasi mendompleng kepentingannya.

Tidak hanya itu, beberapa elite yang semulanya berada di dalam sistem pemerintahan Kota Padang, akhirnya melakukan pembelotan dan melawan kebijakan tersebut, salah satunya adalah Wakil Walikota Padang pada saat itu, Mahyeldi. Mahyeldi yang berpasangan dengan Emzalmi ikut berpartisipasi menandatangani nota kesepahaman penolakan berdirinya *mixed used buliding* bersama dengan enam pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang lainnya. Jaringan internal sebagai pendukung adanya gerakan advokasi FMM datang dari masyarakat Minang yang tergabung dalam FMM yang terdiri dari berbagai ormas dan tokoh masyarakat.

Dalam gerakan advokasi FMM, sosok sentral yang memegang peranan penting adalah sosok Ibnu Aqil, Irfianda Abidin dan H. Masfar Rasyid, SH (MUI Sumbar) sebagai aktor penggerak utama dalam pergerakan FMM.

**Tabel 1**  
**Struktur Organisasi FMM**

No	Nama Anggota FMM	Asal Institusi Profesi	Struktur Keanggotaan FMM
1	H. Masfar Rasyid, SH	Masyarakat Sipil	Ketua
2	Drs. Ibnu Aqil D. Ghani	Masyarakat Sipil	Wakil Ketua
3	Mayor Pol Purn. Maat Acit RB	Masyarakat Sipil	Wakil Ketua
4	H. Irfianda Abidin, SE, MBA	Masyarakat Sipil	Wakil Ketua
5	Khairul Amri, SE	Masyarakat Sipil	Sekretaris
6	M. Shidiq, S. Ag	Masyarakat Sipil	Wakil Sekretaris
7	Ir. H. Andre	Masyarakat Sipil	Bendahara

8	Hamdy El Gumanti	Masyarakat Sipil	Devisi Hukum
8	Drg. H. Drs. Amri Mansyur, MA	Masyarakat Sipil	Drvisi Aksi
9	Jimmi	Masyarakat Sipil	Drvisi Aksi
10	H. Indra Sam, Lc	Masyarakat Sipil	Devisi Sosial dan Pulikasi
11	Budi	Masyarakat Sipil	Devisi Sosial dan Pulikasi
12	Alek	Masyarakat Sipil	Devisi Sosial dan Pulikasi
13	Yeyen Kiram	Masyarakat Sipil	Devisi Logistik dan Pendanaan

Temuan yang didapatkan dalam penelitian gerakan advokasi oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi dari Pemko Padang untuk Lippo Group, terdapat sebuah pola interaksi saling memengaruhi antara unit-unit dalam sistem politik tersebut, yakni antara unit suprastruktur (pemerintahan) dengan unit infrastruktur kelompok kepentingan), dimana telah terjadi tuntutan dari unit Infrastruktur terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh unit suprastruktur, dan uniknya adalah tuntutan tersebut direspon cepat dan masuk kedalam sebuah proses sistem politik yang melahirkan kepuasan akan sebuah output yang diinginkan.

Dalam konteks gerakan advokasi FMM yang muncul di masyarakat Minang, ada beberapa isu salah satu bentuk penolakan dari Ormas Sumbar yang tergabung ke dalam FMM, dengan lantang disuarakan salah satu tokohnya M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau/LKAAM Sumbar) mengatakan, FMM menyatakan sikap menolak pembangunan RS Siloam di Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu dari tujuh tokoh yang melakukan konsolidasi pada tanggal 18 Mei 2013 Irfianda Abidin yang memaparkan bahwa inti utama dari pergerakan di atas berangkat dari isu kristenisasi yang dibawa oleh oleh James T. Riady selaku investor utama dari pembangunan Lippo Plaza. Adapun James T. Riady diketahui merupakan seorang pengikut Kristen Avangelis yang diyakini memiliki misi Kristenisasi di Indonesia. Irfianda Abidin juga mengatakan, bahwasanya konsolidasi tersebut

memiliki tuntutan: (pengulangan-bagian sudah disampaikan di halaman sebelumnya, sebaiknya dihapus).

- a. Menolak Pembangunan Super Block Lippo/Siloam di Jalan Khatib Sulaiman oleh Lippo Group Pimpinan James T. Riady.
- b. Meminta Pemerintah dan DPRD Kota Padang untuk membatalkan izin pembangunan Super Block Lippo/Siloam.

Massa yang tergabung dalam sebuah kelompok kepentingan FMM yang terdiri dari berbagai ormas dan tokoh masyarakat melakukan protes atas pendirian Siloam. Protes yang dilakukan oleh FMM, berupa aksi penggolongan massa dengan mengumpulkan tanda tangan pendukung di sebuah spanduk panjang, dan dilanjutkan dengan aksi demo ke DPRD Kota Padang. Aksi protes ini membuahkan hasil dengan ditundanya pendirian *mixed used building* yang akhirnya hingga saat ini masih terbengkalai. Gagalnya implementasi pendirian *mixed used building* ini tidak terlepas dari kuatnya tekanan masyarakat sipil disatu sisi serta adanya indikasi prosedur izin pendirian yang tidak sesuai dengan juknis.

Temuan lain yang didapatkan peneliti terkait gagal implementasi pendirian *mixed used building* tersebut ialah tidak adanya konfirmasi dan sosialisasi dari pihak investor dalam hal ini PT. SPL kepada masyarakat baik itu masyarakat setempat, tokoh adat dan agama setempat, baik secara formal atau informal sebelum melakukan kegiatan pembangunan, membuat kelompok agama dan tokoh masyarakat mengambil tindakan melalui aksi protes yang terorganisir. Hasilnya, protes dari kalangan masyarakat menjadi kuat dan izin pendirian dapat dipending.

Berangkat dari kesepakatan atas terancamnya eksistensi nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat tersebut, beberapa tokoh yang diidentifikasi sebagai perwakilan masyarakat bersepakatan untuk menggerakkan sebuah perlawanan dengan membingkainya menjadi isu strategis dalam menjaring massa dan aliansi pendukung ke beberapa organisasi

kemasyarakatan di Sumatera Barat, yang muaranya secara bersama-sama berkonsolidasi membuat sebuah organisasi sebagai wadah dan motor pergerakan.

Masalah-masalah ketidakadilan yang dibingkai oleh aktor-aktor gerakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan adanya perubahan. Dengan dasar solidaritas terhadap lingkungan dan rasa senasib yang sama, akhirnya masyarakat bisa dimobilisasi untuk bergerak melawan kebijakan pemerintah yang dengan melakukan aksi demonstrasi serta memblokir jalan. Secara garis besar, proses *framing* dibentuk untuk menciptakan opini di masyarakat mengenai kegagalan institusi.

#### **E. SIMPULAN**

Gerakan Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi PT. SPL dari Pemko berhasil mengubah (memodifikasi) regulasi mengenai perizinan investasi. Gerakan FMM dapat diidentifikasi sebagai gerakan dari masyarakat Minangkabau dalam menolak bentuk penindasan dari kaum dominan dan otoritarian terhadap upaya merusak tatanan nilai-nilai yang telah didisposisikan oleh sistem sosial masyarakat Minangkabau, dapat dimaknai sebagai sebuah gerakan sosial yang berbasis aksi kultural. Adat Bersandi Sarak, Sarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK) dijadikan *frame* oleh FMM sebagai isu utama untuk memobilisasi masyarakat agar mendukung aksi advokasi tersebut.

Berangkat dari kesepakatan atas terancamnya eksistensi nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat tersebut, beberapa tokoh yang diidentifikasi sebagai perwakilan masyarakat bersepakatan untuk menggerakkan sebuah perlawanan dengan membingkainya menjadi isu strategis dalam menjaring massa dan aliansi pendukung ke beberapa organisasi kemasyarakatan di Sumatera Barat, yang muaranya secara bersama-sama berkonsolidasi membuat sebuah organisasi sebagai wadah dan motor pergerakan.

Selanjutnya, keberhasilan gerakan advokasi oleh FMM terhadap kebijakan izin investasi PT. SPL juga tidak terlepas dari adanya indikasi prosedur izin pendirian yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam mengambil kebijakannya terkait Persetujuan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Lingkup untuk mendirikan bangunan *mixed used* oleh PT. SPL, tidak konsisten dengan juknis yang ada. Setiap investor yang akan melakukan investasi di Kota Padang sebelum mengantongi Surat Rekomendasi Walikota, maka ada beberapa proses yang dilalui seperti: Tahap pertama mengantongi Izin Prinsip, Tahap kedua mengantongi Izin Lokasi, Tahap ketiga Izin Lingkungan dan selanjutnya Izin Lanjutan.

Temuan lain yang didapatkan peneliti terkait gagalnya implementasi pendirian *mixed used building* tersebut ialah tidak tersampainya sosialisasi tentang maksud dan tujuan dari investasi yang dilakukan oleh investor kepada masyarakat setempat. Efek dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat telah menimbulkan kecurigaan masyarakat dan menambah keyakinan akan adanya dampak negatif dari pendirian *mixed used building*. Tidak adanya konfirmasi dan sosialisasi dari pihak investor dalam hal ini PT. SPL kepada masyarakat baik itu masyarakat setempat, tokoh adat dan agama setempat, baik secara formal atau informal sebelum melakukan kegiatan pembangunan, membuat kelompok agama dan tokoh masyarakat mengambil tindakan melalui aksi protes yang terorganisir. Hasilnya, protes dari kalangan masyarakat menjadi kuat dan izin pendirian dapat dihentikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul W. Situmorang. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afrizal. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto. (2007). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan Triwibowo. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Harian Umum Haluan Padang, Sabtu, 11 Mei 2013, Lippo Bangun Mal, Hotel, RS dan Sekolah di Padang.
- Muhammad AS. Hikam. 2008. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Mohtar Mas'ued dan Colin MacAndrews. 1995. *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Oman Sukmana. Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory dan Identityoriented Theory. Studi Gerakan Sosial Baru. *Sosiologi Reflektif*, Volume 8, No. 1, Oktober 2013. FISIP UMM.
- Sri Soemantri. Silabi; Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Badan Hukum dan HAM RI Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2009.